



## **SUBSIDI LPG 3 KG DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI KEBIJAKAN: DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN DAN LINGKUNGAN DI JAWA BARAT**

**Riki Satia Muharam<sup>1\*</sup>, Budiman Rusli<sup>2</sup>, Nina Karlina<sup>3</sup>, Candradewini Candradewini<sup>4</sup>**

<sup>1\*</sup>Program Studi Administrasi Keuangan Publik, Sekolah Vokasi, Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

<sup>2,3,4</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

Email: <sup>1\*</sup>[r.satia.muharam@unpad.ac.id](mailto:r.satia.muharam@unpad.ac.id), <sup>2</sup>[budiman.rusli@unpad.ac.id](mailto:budiman.rusli@unpad.ac.id),

<sup>3</sup>[nina.karlina@unpad.ac.id](mailto:nina.karlina@unpad.ac.id), <sup>4</sup>[candradewini@unpad.ac.id](mailto:candradewini@unpad.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan subsidi LPG 3 Kg di Provinsi Jawa Barat dari perspektif sosiologi kebijakan, dengan fokus pada dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan dinamika sosial yang menyertainya. Subsidi LPG 3 Kg dirancang untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin serta meningkatkan akses energi bersih yang terjangkau. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan seperti ketidaktepatan sasaran, ketimpangan distribusi, ketergantungan sosial terhadap subsidi, dan minimnya partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis tematik terhadap data wawancara, observasi, serta dokumentasi kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan subsidi LPG 3 Kg mencerminkan relasi kekuasaan yang tidak setara di tingkat lokal dan menghasilkan ketidakadilan struktural dalam distribusi energi. Oleh karena itu, reformasi kebijakan subsidi diperlukan melalui perbaikan sistem distribusi berbasis data akurat, peningkatan partisipasi masyarakat, dan transisi menuju energi terbarukan yang inklusif dan berkeadilan. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi perumusan kebijakan energi yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Subsidi Energi, LPG 3 Kg, Sosiologi Kebijakan

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the 3 Kg LPG subsidy policy in West Java Province from the perspective of policy sociology, focusing on its impact on community welfare and the accompanying social dynamics. The 3 Kg LPG subsidy was designed to ease the energy expenditure burden of poor households and improve access to affordable clean energy. However, its implementation faces several challenges, including mistargeting, unequal distribution, social dependency on subsidies, and limited public participation in the policy-making process. Using a qualitative descriptive approach and thematic analysis of interview data, observations, and policy documents, the study finds that the 3 Kg LPG subsidy policy reflects unequal power relations at the local level and results in structural injustice in energy distribution. Therefore, policy reform is required through improvements in data-based distribution systems, increased public participation, and a transition toward inclusive and equitable renewable energy. These findings provide important insights for the formulation of fairer and more sustainable energy policies in Indonesia.*

**Keywords:** Energy Subsidy, 3 Kg LPG, Policy Sociology

## A. PENDAHULUAN

Energi merupakan kebutuhan dasar yang tak terpisahkan dari kehidupan rumah tangga modern. Bagi rumah tangga miskin, akses terhadap energi bukan sekadar soal kenyamanan, tetapi menyangkut kelangsungan hidup dan kualitas kehidupan itu sendiri. Tanpa energi yang cukup dan murah, rumah tangga miskin akan mengalami beban pengeluaran yang lebih besar dan terpaksa beralih pada sumber energi tradisional yang kurang efisien dan tidak ramah lingkungan, seperti kayu bakar [1]. Ketergantungan pada sumber energi tradisional juga meningkatkan risiko kesehatan, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang lebih sering terpapar asap dalam rumah tangga [2]. Hal ini tidak hanya memperburuk kondisi sosial-ekonomi mereka, tetapi juga memperluas ketimpangan sosial antar kelas ekonomi [3].

Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 telah menerapkan kebijakan subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg sebagai salah satu bentuk intervensi negara dalam menjamin akses energi yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Subsidi ini ditujukan untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan kecil, dan petani sasaran sebagai bagian dari strategi jaring pengaman sosial [4]. Dalam perspektif ekonomi publik dan kebijakan sosial, subsidi ini merupakan instrumen redistribusi yang bertujuan mengoreksi kegagalan pasar dan menjamin keadilan akses terhadap energi [3]. Selain menjamin daya beli energi, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat rentan serta mengurangi risiko energi sebagai faktor eksklusi sosial [5].

Meskipun kebijakan subsidi LPG 3 Kg dimaksudkan untuk menjamin akses energi bagi kelompok masyarakat miskin, pelaksanaannya di lapangan sering kali menghadapi berbagai problematika struktural. Salah satu isu utama adalah ketidaktepatan sasaran, di mana data penerima subsidi yang tidak akurat menyebabkan rumah tangga mampu turut menikmati subsidi yang seharusnya ditujukan bagi kelompok rentan [6]. Hal ini diperparah dengan lemahnya mekanisme pengawasan di tingkat distribusi, yang membuka peluang terjadinya kebocoran subsidi dalam bentuk penimbunan, penjualan ilegal, dan penyalahgunaan oleh pelaku usaha non-mikro [2].

Fenomena sosial yang menyertai kebijakan subsidi LPG 3 Kg mencakup beberapa dinamika yang kompleks. Pertama, terdapat ketimpangan sosial dalam distribusi subsidi, di mana kelompok yang lebih mampu seringkali memperoleh manfaat yang sama dengan kelompok yang lebih membutuhkan, sehingga memperburuk kesenjangan sosial [7] [8]. Selain itu, kebijakan ini memicu konflik kepentingan antar kelompok, seperti antara rumah tangga miskin yang seharusnya mendapatkan subsidi dengan kelompok pengusaha gas atau pihak yang terlibat dalam distribusi energi yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut [9]. Tak kalah pentingnya, persepsi publik terhadap kebijakan ini cenderung terpolarisasi; sebagian masyarakat menganggap subsidi sebagai langkah positif untuk meringankan beban hidup, sementara yang lain berpendapat bahwa kebijakan ini tidak efektif dan tidak tepat sasaran, karena kelompok yang lebih mampu juga bisa menikmati subsidi tersebut [10].

Urgensi untuk meninjau kebijakan subsidi LPG 3 Kg tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dari perspektif sosiologi kebijakan, yang penting untuk memahami dinamika relasi kekuasaan, keadilan sosial, dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan. Dari sudut pandang sosiologi, kebijakan ini mencerminkan hubungan kekuasaan antara pemerintah, sektor industri energi, dan masyarakat. Proses distribusi subsidi sering kali dipengaruhi oleh kekuatan politik

dan kepentingan ekonomi tertentu, yang dapat menyebabkan kebijakan ini tidak tepat sasaran, bahkan memperburuk ketimpangan sosial [11]. Selain itu, dalam konteks keadilan sosial, penting untuk mempertanyakan apakah kebijakan ini benar-benar menguntungkan kelompok yang paling membutuhkan atau justru memberikan keuntungan bagi kelompok yang lebih mampu. Dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan juga perlu dipertimbangkan, karena kebijakan ini dapat menciptakan ketergantungan pada energi fosil yang berdampak buruk bagi keberlanjutan lingkungan dan menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap energi yang lebih ramah lingkungan [12] [13].

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan subsidi LPG 3 Kg terhadap kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial, dengan memfokuskan pada bagaimana kebijakan ini memengaruhi kelompok masyarakat yang lebih rentan dan melihat dampaknya terhadap kesenjangan sosial. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan kritis terhadap kebijakan subsidi tersebut dengan menggunakan pendekatan sosiologi kebijakan, yang akan mengkaji relasi kekuasaan, distribusi manfaat, serta ketimpangan sosial yang mungkin timbul akibat kebijakan tersebut. Untuk memahami secara mendalam dinamika sosial dan dampak kebijakan subsidi LPG 3 Kg, khususnya di wilayah Jawa Barat, diperlukan pendekatan yang mampu menangkap kompleksitas realitas di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memungkinkan penelusuran terhadap persepsi, pengalaman, dan relasi kekuasaan yang terlibat dalam kebijakan subsidi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai implikasi sosial dari kebijakan subsidi LPG 3 Kg dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih inklusif dan adil.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk menganalisis kebijakan subsidi LPG 3 Kg dalam perspektif sosiologi kebijakan, khususnya terkait dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan di Provinsi Jawa Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi realitas sosial secara mendalam dan memahami bagaimana kebijakan dipahami, diakses, dan dijalankan oleh berbagai aktor di lapangan [14]. Penelitian dilakukan di beberapa wilayah dengan karakter sosial yang beragam seperti Kota Bandung, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Garut untuk menangkap keragaman konteks penerapan kebijakan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penerima manfaat, agen distribusi, aparat pemerintah desa, dan dinas terkait, serta melalui observasi langsung terhadap praktik distribusi dan penggunaan LPG 3 Kg di masyarakat. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan untuk menelaah kebijakan formal, data statistik, serta laporan distribusi subsidi.

Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yakni memilih narasumber berdasarkan kriteria yang relevan dengan fokus penelitian. Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, serta member checking untuk mengonfirmasi kebenaran informasi kepada informan utama [15]. Data dianalisis dengan pendekatan analisis tematik, yakni mengidentifikasi pola-pola naratif dan dinamika sosial dari kebijakan subsidi LPG, yang kemudian ditafsirkan dengan menggunakan teori-teori sosiologi kebijakan, seperti konsep relasi kekuasaan, eksklusivitas sosial, dan ketidakadilan struktural [16]. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan

pemahaman yang lebih holistik mengenai ketimpangan akses, persepsi publik, dan dampak kebijakan terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Dampak kebijakan subsidi LPG 3 Kg terhadap kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial.**

##### **1. Akses dan Keterjangkauan Energi**

Menurut data dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF), konsumsi LPG melonjak dari 0,9 juta metrik ton pada tahun 2007 menjadi lebih dari 7 juta metrik ton pada 2022, yang sebagian besar berasal dari kelompok rumah tangga [17]. Hal ini menunjukkan bahwa subsidi telah berkontribusi terhadap transisi energi rumah tangga, terutama dalam mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Namun demikian, efektivitas subsidi dalam meningkatkan keterjangkauan energi masih dihadapkan pada tantangan ketimpangan distribusi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga miskin di daerah terpencil atau pedesaan justru lebih sulit mengakses LPG 3 Kg dibandingkan dengan masyarakat di kawasan perkotaan [18].

Dari sisi sosiologis, keterjangkauan energi bukan hanya soal harga, tetapi juga berkaitan erat dengan akses sosial dan infrastruktur distribusi, yang sering kali bias terhadap wilayah yang lebih berkembang. Rumah tangga yang tinggal di wilayah yang jauh dari pangkalan LPG kerap menghadapi harga LPG di atas harga eceran tertinggi (HET), akibat praktik distribusi berlapis dan lemahnya intervensi negara. Fenomena ini menciptakan kesenjangan sosial dalam akses terhadap hak dasar energi, dan berpotensi memperkuat eksklusi sosial terhadap kelompok miskin yang justru menjadi prioritas kebijakan.

##### **2. Efek terhadap Pengeluaran Rumah Tangga**

Studi dari Asian Development Bank [19] menyebutkan bahwa subsidi energi seperti LPG 3 Kg dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin sebesar 8–12% dalam jangka pendek karena menurunkan biaya kebutuhan pokok sehari-hari, terutama energi untuk memasak. Perbandingan pengeluaran energi rumah tangga sebelum dan sesudah adanya subsidi menunjukkan penurunan signifikan. Sebagai contoh, menurut data dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM FEB UI), sebelum program konversi minyak tanah ke LPG pada tahun 2007, rumah tangga di kelompok pendapatan terbawah menghabiskan rata-rata 15–20% dari pengeluaran bulannya untuk bahan bakar memasak. Setelah program subsidi LPG 3 Kg berjalan, angka ini menurun menjadi sekitar 8–10% [20]. Efisiensi ini memberikan ruang fiskal dalam anggaran rumah tangga untuk dialokasikan ke pos kebutuhan lain yang lebih produktif atau penting, seperti biaya pendidikan anak, pembelian bahan makanan bergizi, serta akses terhadap layanan kesehatan dasar.

##### **3. Ketimpangan Sosial dan Ketidaktepatsasaran**

Salah satu kritik utama terhadap kebijakan subsidi LPG 3 Kg adalah masalah ketidaktepatsasaran penerima manfaat, yang justru memperbesar ketimpangan sosial antar kelompok masyarakat. Secara ideal, subsidi ini ditujukan untuk kelompok rumah tangga miskin agar dapat menikmati energi bersih dengan harga terjangkau. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa sebagian besar volume subsidi justru dinikmati oleh kelompok rumah tangga kelas menengah ke atas. Menurut laporan Bank Dunia (2020), sekitar 40%

subsidi energi di Indonesia dinikmati oleh 30% rumah tangga terkaya, sedangkan hanya sekitar 20% yang benar-benar sampai ke kelompok miskin yang menjadi sasaran utama kebijakan.

Di tingkat komunitas, ketidaktepat sasaran subsidi dapat menimbulkan stigma sosial, di mana individu atau keluarga yang tidak mendapat akses dianggap kurang beruntung atau tidak memiliki "kedekatan sosial" dengan pihak pengelola distribusi. Ini memperkuat eksklusi sosial dan memperlemah kohesi sosial dalam masyarakat, terutama di desa-desa atau wilayah dengan struktur sosial yang hierarkis. Dalam perspektif sosiologi kebijakan, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan subsidi energi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menciptakan ketimpangan simbolik dan relasi kuasa yang tidak setara di tingkat lokal [16] [21].

#### 4. Ketergantungan Sosial terhadap Subsidi

Risiko sosial yang paling besar muncul ketika kebijakan subsidi LPG 3 Kg dikurangi atau bahkan dihapuskan. Sebuah studi oleh Bank Dunia (2021) menunjukkan bahwa penghentian atau pengurangan subsidi energi berpotensi menyebabkan lonjakan harga LPG, yang dapat memperburuk kemiskinan energi di kalangan rumah tangga miskin. Keadaan ini akan menyebabkan penurunan daya beli dan kualitas hidup masyarakat yang telah sangat bergantung pada energi bersubsidi tersebut, menciptakan ketegangan sosial dan protes publik. Pada skala yang lebih luas, penghapusan subsidi dapat menyebabkan dampak domino terhadap stabilitas sosial dan politik, terutama jika tidak disertai dengan kebijakan pengalihan atau solusi pengganti yang memadai. Ketergantungan sosial yang sudah terbentuk membuat masyarakat merasa bahwa subsidi adalah hak yang tidak bisa diganggu gugat, dan perubahan kebijakan terkait dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan.

Oleh karena itu, transisi menuju sumber energi alternatif harus didukung oleh kebijakan yang tidak hanya mengurangi subsidi LPG secara bertahap, tetapi juga menyediakan pelatihan, informasi, dan insentif untuk mendorong peralihan ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kebijakan semacam ini harus memperhitungkan dimensi sosial agar tidak memperburuk ketimpangan atau menyebabkan kecemasan di kalangan masyarakat yang paling rentan [22].

#### 5. Relasi Sosial dan Distribusi Kekuasaan

Dalam konteks kebijakan subsidi LPG 3 Kg, aktor lokal seperti pengecer, ketua RT/RW, serta aparat desa memainkan peran dominan dalam distribusi subsidi, yang mencerminkan praktik patronase dalam relasi kuasa lokal. Dalam struktur sosial yang hierarkis, distribusi LPG menjadi bentuk *clientelism*, di mana akses terhadap sumber daya publik bergantung pada kedekatan sosial-politik dengan elite lokal. Hal ini sesuai dengan pandangan Fischer (2003) bahwa kebijakan sering kali dijalankan bukan berdasarkan kebutuhan objektif, melainkan relasi kuasa yang mencerminkan struktur sosial yang timpang. Hal ini sering kali terjadi karena distribusi subsidi tidak langsung disalurkan oleh pemerintah, melainkan melalui saluran distribusi yang berada di bawah kendali aktor lokal yang lebih dekat dengan masyarakat. Sebagai contoh, pengecer LPG di tingkat desa atau kelurahan sering kali memiliki kuota distribusi yang terbatas, dan mereka dapat memilih untuk mendistribusikan LPG bersubsidi sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti hubungan personal,

kedekatan sosial, atau bahkan kedekatan politik. Hal ini bisa menciptakan ketidakadilan distribusi, di mana mereka yang lebih dekat dengan pihak pengelola atau yang memiliki akses ke kekuasaan lokal cenderung lebih diuntungkan. Sebagai hasilnya, kelompok rumah tangga miskin yang tidak memiliki hubungan sosial yang kuat dengan aktor-aktor lokal ini menjadi lebih sulit untuk mendapatkan LPG dengan harga subsidi yang terjangkau.

#### 6. Persepsi Publik terhadap Kebijakan

Respons masyarakat terhadap keberadaan dan pelaksanaan kebijakan subsidi LPG 3 Kg sangat bervariasi, tergantung pada tingkat akses yang mereka peroleh dan dampak yang dirasakan. Secara umum, sebagian besar masyarakat yang mendapatkan akses langsung merasa bahwa subsidi LPG 3 Kg adalah kebijakan yang membantu meringankan beban hidup, terutama bagi rumah tangga miskin di daerah pedesaan. Namun, respons ini juga dipengaruhi oleh pengalaman mereka terhadap distribusi subsidi yang tidak merata, yang kadang-kadang mengarah pada kelangkaan LPG di beberapa wilayah atau praktik penimbunan oleh pedagang atau pengecer. Sebagai hasilnya, meskipun ada kelompok yang merasa terbantu, ada juga yang merasa kebijakan ini tidak memenuhi harapan mereka karena kesulitan akses atau ketidakpastian harga. Sebagai contoh, sebuah survei yang dilakukan oleh Indonesian Consumer Protection Foundation (YLKI) (2020) menunjukkan bahwa meskipun 70% responden menyatakan merasa terbantu oleh subsidi LPG 3 Kg, 45% dari mereka juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG bersubsidi dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah.

Aspirasi masyarakat terhadap kebijakan energi yang lebih adil dan transparan menunjukkan adanya kebutuhan yang mendalam untuk reformasi sistem subsidi energi yang lebih berkeadilan dan terbuka. Banyak masyarakat yang menginginkan kebijakan yang tidak hanya memberikan subsidi langsung, tetapi juga mendukung diversifikasi energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti penggunaan energi terbarukan yang terjangkau. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM FEB UI) (2022) mengungkapkan bahwa hampir 60% masyarakat mendukung transisi energi yang lebih berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan keadilan sosial dalam distribusi manfaatnya. Mereka juga menginginkan kebijakan yang lebih transparan dalam hal pendistribusian dan pengawasan subsidi, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terpinggirkan dalam akses energi.

#### 7. Implikasi terhadap Kesejahteraan Sosial

Pengaruh subsidi terhadap dimensi kesejahteraan seperti rasa aman, kesetaraan, dan integrasi sosial dapat dilihat dari beberapa aspek. Pada sisi positif, subsidi LPG 3 Kg memberikan rasa aman bagi rumah tangga miskin, karena mereka tidak perlu khawatir tentang kenaikan harga energi yang dapat meningkatkan biaya hidup mereka. Dengan subsidi ini, mereka dapat mengalokasikan lebih banyak penghasilan untuk kebutuhan lain seperti makanan, pendidikan, atau kesehatan, yang mendukung peningkatan kualitas hidup. Namun, di sisi lain, subsidi ini juga dapat memperburuk ketimpangan sosial jika distribusinya tidak adil, karena mereka yang memiliki akses lebih besar terhadap subsidi akan merasa lebih aman dan lebih terpenuhi kebutuhannya, sedangkan yang tidak mendapatkan akses merasa terpinggirkan, memperburuk rasa ketidakadilan dan memperlemah integrasi sosial dalam masyarakat. Hal ini

tercermin dalam laporan Bank Dunia (2021), yang mengungkapkan bahwa subsidi energi yang tidak merata justru bisa menambah jurang ketimpangan sosial di masyarakat.

## **Tinjauan Kritis terhadap Kebijakan Subsidi dengan Pendekatan Sosiologi**

### **1. Pendahuluan: Kerangka Sosiologi Kebijakan**

Konsep sosiologi kebijakan memandang kebijakan sebagai suatu produk sosial yang dipengaruhi oleh interaksi antar individu, kelompok, dan institusi dalam masyarakat. Kebijakan tidak hanya dilihat sebagai hasil dari prosedur administratif yang terpisah dari realitas sosial, tetapi juga sebagai hasil dari proses sosial yang melibatkan dinamika kekuasaan, konflik, dan negosiasi antar aktor yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan oleh Fischer (2003), kebijakan publik adalah hasil dari proses sosial yang dibentuk oleh nilai-nilai, kepentingan, dan kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan tidak hanya dilihat sebagai keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga negara, tetapi sebagai arena pertarungan di mana berbagai pihak berusaha memperjuangkan kepentingan mereka dan mempengaruhi keputusan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.

Relevansi pendekatan ini dalam menganalisis kebijakan subsidi energi sangat penting untuk memahami dampak sosial dan politik dari kebijakan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi kebijakan, kita dapat melihat bahwa kebijakan subsidi energi bukan hanya soal efektivitas distribusi energi, tetapi juga soal bagaimana kebijakan ini menciptakan hubungan sosial yang baru dan memperburuk ketimpangan. Penentuan siapa yang berhak menerima subsidi, bagaimana kebijakan itu diterapkan, dan dampaknya terhadap masyarakat miskin dan kaya, semua merupakan aspek yang harus dianalisis melalui lensa sosiologi kebijakan. Pendekatan ini membantu kita memahami bahwa kebijakan energi bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah sosial dan politik yang melibatkan berbagai kepentingan, baik yang eksplisit maupun yang terselubung [16] [24].

### **2. Karakter Sosial dalam Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg**

Kebijakan subsidi LPG 3 Kg umumnya dirumuskan oleh pemerintah pusat dengan melibatkan berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali melibatkan pihak-pihak di tingkat lokal, seperti pemerintah daerah dan distributor LPG yang berperan dalam pendistribusian barang bersubsidi. Pihak yang merumuskan kebijakan sering kali berasal dari kalangan teknokrat dan pejabat pemerintahan yang berfokus pada efisiensi distribusi energi dan pengendalian inflasi. Namun, yang mendapatkan manfaat utama dari kebijakan ini adalah rumah tangga miskin dan masyarakat berpendapatan rendah yang menggunakan LPG 3 Kg sebagai sumber energi utama mereka. Kebijakan subsidi ini dimaksudkan untuk meringankan beban pengeluaran energi masyarakat miskin yang rentan terhadap kenaikan harga energi, tetapi dalam pelaksanaannya, distribusi yang tidak merata dan ketidakadilan dalam akses bisa menyebabkan ketimpangan dalam manfaat yang diterima.

Secara teoritis, kebijakan subsidi LPG 3 Kg seharusnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin dengan menyediakan energi rumah tangga dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, dalam praktiknya, ketidaktepatan

sasaran sering menjadi masalah utama. Meskipun subsidi ditujukan untuk rumah tangga miskin, kenyataannya ada banyak rumah tangga yang tidak memenuhi syarat namun tetap mendapatkan LPG bersubsidi, sementara yang berhak justru kesulitan mengaksesnya. Berdasarkan studi oleh LPEM FEB UI (2022), hampir 30% dari subsidi LPG 3 Kg tidak sampai pada keluarga miskin yang menjadi sasaran utama kebijakan. Hal ini terjadi karena distribusi subsidi yang tidak sepenuhnya transparan dan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik lokal atau relasi sosial antara pengecer dan konsumen.

### 3. Relasi Kekuasaan dalam Distribusi Subsidi

Dalam pelaksanaan kebijakan subsidi LPG 3 Kg, aktor lokal memainkan peran penting dalam menentukan siapa yang mendapatkan akses dan siapa yang tidak. Elite desa sering kali memiliki kekuasaan sosial dan politik yang besar dalam mengatur distribusi subsidi di tingkat desa atau kelurahan. Mereka dapat mempengaruhi siapa yang mendapat prioritas untuk menerima subsidi atau mengakses LPG dengan harga lebih rendah. Demikian pula, pengecer LPG yang berada di lapangan juga memegang peran kunci, karena mereka bertanggung jawab untuk menjual LPG bersubsidi kepada masyarakat. Mereka dapat memilih untuk menyediakan subsidi hanya kepada kelompok tertentu berdasarkan kedekatan mereka dengan pelanggan atau berdasarkan preferensi pribadi.

Dalam konteks kebijakan subsidi LPG 3 Kg, dinamika *patronase* menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi distribusi. *Patronase* merujuk pada hubungan saling menguntungkan antara pihak yang berkuasa dengan masyarakat atau kelompok tertentu, di mana akses terhadap subsidi energi dapat diberikan kepada mereka yang memiliki kedekatan sosial atau politik dengan aktor-aktor yang mengatur distribusi. Misalnya, warga yang memiliki kedekatan dengan pemerintah desa atau anggota kelompok politik tertentu lebih mungkin mendapat akses ke LPG bersubsidi dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki jaringan sosial atau politik yang kuat. Dinamika ini sering menciptakan ketidakpuasan di kalangan warga yang merasa terpinggirkan, dan memperburuk segregasi sosial serta memperkuat ketimpangan yang ada di masyarakat. Hal ini juga menciptakan ketidakadilan sosial, karena mereka yang paling membutuhkan subsidi justru tidak dapat mengaksesnya karena kekurangan hubungan atau kekuasaan dalam sistem sosial. Penelitian oleh Sovacool (2018) menunjukkan bahwa kebijakan subsidi yang tidak didukung dengan sistem distribusi yang adil akan memperburuk segregasi sosial dan menambah ketimpangan akses terhadap sumber daya penting seperti energi.

### 4. Ketidaktepat sasaran sebagai Gejala Ketidakadilan Struktural

Dalam konteks kebijakan subsidi LPG 3 Kg, kita bisa membedakan antara kegagalan teknis dan kegagalan struktural. Kegagalan teknis terjadi ketika distribusi subsidi tidak berjalan sesuai dengan rencana karena masalah operasional, seperti ketidaktepatan data, kurangnya koordinasi antar lembaga, atau terhambatnya distribusi fisik (misalnya, kekurangan stok atau infrastruktur distribusi yang tidak memadai). Kegagalan teknis ini sering kali bisa diatasi dengan perbaikan dalam prosedur administratif, penggunaan teknologi yang lebih baik, atau peningkatan pengawasan.

Namun, kegagalan struktural lebih mendalam dan mencakup masalah sistemik dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang mengatur kebijakan tersebut. Kegagalan struktural ini terjadi ketika kebijakan subsidi energi seperti



LPG 3 Kg, meskipun dirancang untuk membantu kelompok miskin, ternyata gagal menjangkau mereka yang paling membutuhkan karena ketimpangan dalam struktur sosial dan kekuasaan. Sovacool (2018) menyatakan bahwa kegagalan struktural sering kali muncul dalam kebijakan energi yang bersifat subsidi, karena seringkali subjek kebijakan adalah mereka yang tidak memiliki suara atau pengaruh dalam pembuatan kebijakan tersebut.

Ketidaktepatsasaran dalam kebijakan subsidi LPG 3 Kg dapat berpotensi merusak legitimasi kebijakan tersebut di mata publik. Ketika distribusi subsidi tidak merata dan hanya menguntungkan kelompok tertentu yang tidak sesuai dengan tujuan kebijakan, masyarakat mulai meragukan keadilan dari kebijakan tersebut. Hal ini dapat mengarah pada penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan kebijakan publik secara keseluruhan. Selain itu, ketidaktepatsasaran sering kali menambah perasaan ketidakadilan sosial dan kecemburuan sosial antara mereka yang merasa tidak mendapat manfaat dari subsidi dan mereka yang mendapat akses lebih mudah. Ketidakadilan ini, pada gilirannya, dapat memperburuk polaritas sosial dan menciptakan ketegangan antar kelompok dalam masyarakat, yang pada akhirnya merusak legitimasi kebijakan pemerintah. Parsons (1995) menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak adil dalam distribusinya dapat menurunkan kepercayaan sosial terhadap institusi yang mengeluarkan kebijakan tersebut, serta menyebabkan kerusakan jangka panjang dalam hubungan sosial antara pemerintah dan masyarakat.

Fenomena ini tidak hanya menunjukkan kegagalan administratif, tetapi juga merupakan refleksi dari ketidakadilan struktural, sebagaimana dikemukakan dalam tinjauan kritis. Kesenjangan sosial ini diperkuat oleh mekanisme distribusi yang tidak demokratis, di mana keputusan tidak dibuat melalui proses partisipatif, melainkan melalui struktur kekuasaan lokal yang tertutup.

##### 5. Minimnya Partisipasi Publik dan Representasi Sosial

Salah satu masalah mendasar dalam kebijakan subsidi LPG 3 Kg adalah posisi masyarakat miskin yang lebih sering dijadikan objek kebijakan daripada subjek kebijakan. Artinya, kebijakan dibuat tanpa melibatkan mereka secara langsung dalam perencanaan, desain, atau evaluasi kebijakan tersebut. Masyarakat miskin, yang seharusnya menjadi pihak yang paling diuntungkan oleh kebijakan ini, justru sering kali hanya dipandang sebagai penerima manfaat yang pasif, bukan sebagai aktor yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Fischer (2003) menekankan bahwa dalam banyak kebijakan publik, terutama yang menyangkut isu sosial, masyarakat sering diposisikan sebagai objek dari kebijakan yang dianggap sudah "baik" untuk mereka, tanpa mempertimbangkan pandangan atau kebutuhan nyata mereka. Hal ini menyebabkan kebijakan subsidi menjadi tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat miskin, dan malah memperburuk ketidakadilan sosial karena kebijakan dibuat tanpa keterlibatan langsung dari pihak yang paling terpengaruh.

Kurangnya ruang partisipasi warga dalam proses desain dan evaluasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg berkontribusi besar terhadap ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam mendapatkan manfaat yang lebih maksimal. Partisipasi publik yang terbatas dalam kebijakan publik, terutama dalam penentuan arah kebijakan dan penilaian pelaksanaannya, memperlihatkan bahwa banyak kebijakan dibuat tanpa memahami konteks lokal dan kebutuhan riil masyarakat. Masyarakat yang seharusnya memiliki hak suara dalam

menentukan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan sering kali tidak diberikan kesempatan untuk berdialog langsung dengan pembuat kebijakan. Proses kebijakan yang lebih bersifat top-down ini cenderung mengabaikan perbedaan konteks sosial dan ekonomi antarwilayah, yang pada akhirnya menciptakan kesenjangan dalam implementasi kebijakan. Sebagai contoh, beberapa daerah yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses subsidi yang seharusnya mereka terima. Parsons (1995) menyoroti bahwa kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan menyebabkan kebijakan tersebut cenderung tidak responsif terhadap perbedaan kebutuhan sosial, yang membuatnya kurang efektif dan tidak adil.

Minimnya partisipasi publik dalam kebijakan subsidi LPG 3 Kg berdampak pada rasa memiliki dan kepercayaan sosial masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Ketika masyarakat miskin tidak dilibatkan dalam proses kebijakan, mereka sering merasa terpinggirkan dan tidak memiliki kendali atas keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Hal ini mengarah pada penurunan rasa memiliki terhadap kebijakan, karena mereka merasa kebijakan tersebut bukanlah hasil perjuangan mereka, tetapi justru lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan pihak-pihak lain yang tidak memperhatikan kebutuhan mereka. Selain itu, kepercayaan sosial terhadap pemerintah dan lembaga yang mengelola distribusi subsidi bisa menurun drastis. Ketika masyarakat merasa diabaikan dalam proses pembuatan kebijakan, mereka cenderung merasa tidak dihargai, yang akhirnya mempengaruhi legitimasi kebijakan itu sendiri. Sovacool (2018) mengingatkan bahwa kurangnya partisipasi publik dalam kebijakan energi dapat menyebabkan kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, yang pada gilirannya memperburuk polaritas sosial dan fragmentasi di masyarakat.

## 6. Kritik terhadap Rasionalitas Teknokratik

Kebijakan subsidi LPG 3 Kg sering kali dirancang dengan pendekatan teknokratik, yang menekankan pada efisiensi fiskal dan volume distribusi sebagai indikator utama keberhasilan kebijakan. Pendekatan ini berfokus pada aspek administratif dan pengelolaan anggaran negara, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan spesifik masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. Rasionalitas teknokratik ini sering kali mengabaikan realitas sosial yang ada di lapangan, di mana terdapat keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di berbagai wilayah. Sebagai contoh, kebijakan subsidi yang didasarkan pada rasio volume distribusi yang sederhana tanpa mempertimbangkan aksesibilitas dan kebutuhan riil masyarakat dapat menghasilkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan dalam distribusi. Sebuah studi oleh Sovacool (2018) menunjukkan bahwa kebijakan yang hanya berfokus pada angka-angka teknis sering kali gagal mengatasi masalah ketidaksetaraan dan ketidaksesuaian antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

Untuk memastikan kebijakan subsidi LPG 3 Kg benar-benar efektif dan adil, penting untuk mengintegrasikan pengetahuan lokal dan realitas sosial dalam perancangannya. Pengetahuan lokal mengacu pada wawasan yang dimiliki oleh masyarakat setempat tentang kondisi sosial, budaya, dan ekonomi mereka. Menggunakan pengetahuan lokal dalam desain kebijakan memungkinkan pembuatan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam. Dengan mempertimbangkan konteks lokal, kebijakan subsidi dapat

lebih mudah diakses oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan, mengurangi pemborosan subsidi, dan meminimalkan ketimpangan dalam distribusi. Fischer (2003) berpendapat bahwa kebijakan yang mengabaikan konteks sosial dan pengetahuan lokal akan lebih rentan terhadap kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, seperti pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Pendekatan teknokratik yang tidak mengintegrasikan konteks sosial dan pengetahuan lokal dapat menghasilkan sejumlah konsekuensi negatif dalam kebijakan subsidi LPG 3 Kg. Misalnya, di beberapa daerah terpencil, ketersediaan LPG sering kali terbatas karena infrastruktur distribusi yang buruk, yang tidak diperhitungkan dalam kebijakan berbasis volume distribusi saja. Dalam hal ini, meskipun kebijakan subsidi sudah memperhitungkan volume LPG yang dibutuhkan, distribusi tidak dapat terlaksana dengan baik di wilayah yang jauh dari pusat distribusi. Akibatnya, masyarakat miskin di daerah tersebut justru tidak dapat mengakses LPG yang bersubsidi, sementara masyarakat di kota besar atau wilayah yang lebih dekat dengan sumber distribusi dapat menikmati subsidi tersebut. Selain itu, kebijakan ini juga mengabaikan perbedaan pola konsumsi energi di tiap daerah. Di daerah-daerah yang lebih mengandalkan energi alternatif atau bahan bakar lain, seperti kayu atau arang, kebijakan subsidi LPG yang terlalu teknis dan kurang mengakomodasi kearifan lokal justru tidak efektif dan menambah biaya sosial bagi masyarakat yang tidak cocok dengan kebijakan tersebut. Parsons (1995) juga mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak mengakomodasi kondisi sosial yang beragam dapat berisiko menambah polarisasi sosial dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Jika ditinjau secara holistik, kebijakan subsidi LPG 3 Kg telah mempengaruhi kesejahteraan sosial dalam berbagai dimensi: dari akses energi dan pengeluaran rumah tangga hingga ketimpangan dan ketergantungan struktural. Relasi kekuasaan yang timpang dan minimnya partisipasi publik memperkuat eksklusi sosial dan mengurangi rasa keadilan. Implikasi sosial ini menunjukkan bahwa kebijakan subsidi bukan sekadar alat ekonomi, tetapi arena politik distribusi sumber daya yang sarat kepentingan. Oleh karena itu, pendekatan kesejahteraan tidak cukup hanya mengukur dampak fiskal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan distribusi, pengakuan sosial, dan penguatan kohesi masyarakat

#### **D. KESIMPULAN**

Kebijakan subsidi LPG 3 Kg di Jawa Barat telah memberikan kontribusi nyata dalam memperluas akses energi bersih dan meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin. Meskipun demikian, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait dengan ketidaktepatan sasaran, ketimpangan akses, dominasi aktor lokal dalam distribusi, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Dari perspektif sosiologi kebijakan, permasalahan-permasalahan tersebut mencerminkan kegagalan struktural yang bersumber dari ketimpangan relasi kekuasaan, eksklusi sosial, dan lemahnya representasi kelompok miskin sebagai subjek kebijakan. Oleh karena itu, meskipun subsidi ini bersifat membantu dalam jangka pendek, ketergantungan yang tercipta justru dapat memperlemah ketahanan energi rumah tangga miskin dan menciptakan ketidakadilan sosial yang lebih dalam apabila tidak diimbangi dengan reformasi sistemik.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan serangkaian langkah kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pertama, pemerintah perlu memperbaiki sistem pendataan penerima subsidi dengan mekanisme verifikasi yang berbasis by name by address guna memastikan subsidi benar-benar menjangkau rumah tangga miskin. Kedua, digitalisasi dalam sistem distribusi, seperti penggunaan aplikasi berbasis NIK atau QR code, perlu diterapkan untuk meningkatkan akurasi dan transparansi distribusi subsidi. Ketiga, partisipasi masyarakat harus ditingkatkan, terutama dengan melibatkan kelompok rentan dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan, agar aspirasi dan kebutuhan mereka dapat terakomodasi secara adil. Keempat, kapasitas aktor lokal seperti pengecor dan aparatur desa perlu diperkuat melalui pelatihan dan pengawasan, guna menghindari penyimpangan distribusi yang dipengaruhi oleh relasi sosial atau politik lokal. Kelima, pemerintah perlu mendorong transisi bertahap ke energi terbarukan melalui penyediaan insentif, edukasi, dan infrastruktur pendukung, sehingga masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada energi berbasis fosil. Terakhir, evaluasi kebijakan subsidi energi harus dilakukan secara multidimensi, tidak hanya menekankan aspek fiskal, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial, dampak lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan subsidi LPG dapat diarahkan menuju pendekatan yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Haryanto and F. Restiani, "Dampak Penurunan Emisi GRK pada Program Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg," *Jurnal Konservasi Sumberdaya Alam*, pp. 1-10, 2020.
- [2] L. Lestari and M. Rahmawati, "Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kelangkaan Gas LPG Subsidi di Indonesia," *Journal of Economics and Social Sciences*, pp. 115-116, 2023.
- [3] J. E. Stiglitz and J. K. Rosengard, *Economics of the Public Sector* (4th ed.), W.W. Norton & Company, 2015.
- [4] Badan Kebijakan Fiskal, "Kajian Kebijakan Subsidi LPG Tabung 3 Kg Tepat Sasaran," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020.
- [5] INDEF, "Dampak Subsidi BBM dan LPG 3 Kg Terhadap Kemiskinan Nelayan," Policy Brief No. 3/2023, 2023.
- [6] TNP2K, "Analisis Transformasi Subsidi Energi: Subsidi LPG Tabung 3 Kg dan Subsidi Listrik Rumah Tangga," Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2021.
- [7] C. Parker, "Social Inequality and the Distribution of Public Subsidies in Developing Countries," *Economic Development Review*, pp. 54-67, 2015.
- [8] L. Sihombing, "Ketimpangan Sosial dalam Kebijakan Subsidi di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial*, pp. 101-114, 2018.
- [9] M. Junaidi and A. Iskandar, "Konflik Kepentingan dalam Kebijakan Subsidi Energi di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Publik*, pp. 145-158, 2019.
- [10] R. Setiawan, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Subsidi Energi di Indonesia," *Jurnal Energi dan Kebijakan Sosial*, pp. 32-41, 2017.
- [11] M. Foucault, *The Birth of Biopolitics: Michel Foucault and the Politics of Governmentality*, Palgrave Macmillan, 2009.

- [12] K. Hawkins, "Social Justice and Energy Policy: Understanding the Impact of Fossil Fuel Subsidies on Vulnerable Populations," *Journal of Environmental Policy*, pp. 123-135, 2017.
- [13] T. Piketty, *Capital in the Twenty-First Century*, Harvard University Press, 2014.
- [14] J. W. Cresswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.), SAGE Publications, 2014.
- [15] M. B. Miles, A. M. Huberman and J. Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.), SAGE Publications, 2014.
- [16] F. Fischer, *Reframing Public Policy: Discursive Politics and Deliberative Practices*, Oxford University Press, 2003.
- [17] Badan Kebijakan Fiskal, "Laporan Kinerja dan Evaluasi Subsidi Energi Tahun 2022-2023," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023.
- [18] A. Pradana and W. Riyanto, "Evaluasi Distribusi LPG 3 Kg Bersubsidi: Perspektif Ketepatan Sasaran dan Keadilan Sosial," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, pp. 101-113, 2021.
- [19] A. D. B. ADB, "Energy Subsidies and the Poor: Time to Reform," ADB Publications, 2021.
- [20] LPEM FEB UI, "Analisis Dampak Subsidi LPG 3 Kg terhadap Pengeluaran Rumah Tangga," Universitas Indonesia, Jakarta, 2022.
- [21] J. S. Dryzek and P. Dunleavy, *Theories of the Democratic State*, Palgrave Macmillan, 2009.
- [22] B. K. Sovacool, *The Political Economy of Energy Subsidies in the Global South*, Palgrave Macmillan, 2018.
- [23] Bank Dunia, "Indonesia Energy Sector: Assessing the Impact of Energy Subsidy Reform," World Bank Group, 2021.
- [24] T. Parsons, *Social Systems and the Evolution of Action Theory*, Free Press, 1995.
- [25] A. D. B. ADB, "Energy Subsidies and the Poor: Time to Reform," ADB Publications.